

**PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP**



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN ANGGARAN 2023**

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Permendagri Nomor 54 tahun 2010 pada lampiran VI bagian E.1.1 dan E.1.2 menyatakan bahwa Kepala SKPD menyampaikan rancangan akhir Perubahan Renja SKPD kepada kepala Bappeda, dan Bappeda melakukan verifikasi akhir terhadap rancangan-rancangan akhir Renja SKPD, untuk menjamin kesesuaian antara program dan kegiatan SOPD dengan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam RKPD.

Sehubungan dengan hal tersebut maka untuk mewujudkan pelaksanaan Otonomi daerah agar sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, dan sesuai dengan amanat yang sudah dituangkan dalam aturan perundangan maka Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan telah menyelesaikan susunan Laporan Rancangan Akhir Perubahan Renja SKPD Tahun 2023.

Demikian Laporan Rancangan Akhir Perubahan Renja SKPD Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Tahun 2023 ini kami sampaikan, kiranya dapat dijadikan sebagai salah satu bahan evaluasi untuk keperluan pembinaan terhadap SKPD Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Balangan.

Paringin, Agustus 2023.
Kepala Dinas Pertanahan dan
Lingkungan Hidup.



Aidinnor, S.Sos, MM
NIP. 19670817 198509 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Landasan Hukum
3. Tujuan
4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI TRIWULAN II TAHUN 2023

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD

BAB. IV PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pembangunan bidang lingkungan hidup merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan proses pembangunan nasional yang diarahkan untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia menuju masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, mandiri dan bermartabat. Keberhasilan pembangunan nasional tidak mungkin dapat terwujud tanpa didukung oleh aparatur negara yang memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam bidang tugasnya masing-masing, transparan, profesional dan akuntabel. Setiap penyelenggara negara dan pemerintah harus mampu menampilkan akuntabilitas kinerjanya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sehingga terjadi sinkronisasi antara perencanaan ideal yang dicanangkan dengan keluaran dan manfaat yang dihasilkan.

Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan upaya untuk menciptakan lingkungan yang berkualitas yang melibatkan berbagai pihak baik Perencana, Pengambil Keputusan, Penegak Hukum dan Pejabat Pemerintah, maupun dunia usaha serta masyarakat. Oleh karenanya kesamaan persepsi dan sikap semua pihak yang terlibat dalam menghadapi persoalan lingkungan hidup perlu dibina agar pengelolaan dapat mencapai hasil yang optimal.

Rencana Kerja (Renja) mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, dan cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi kebijakan, program, dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Rencana Kerja (Renja) merupakan keputusan mendasar yang dinyatakan secara garis besar sebagai acuan operasional kegiatan organisasi, terutama dalam mencapai tujuan akhir organisasi.

Setiap instansi pemerintah diharapkan dapat mengembangkan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan pencapaian hasil yang diinginkan secara objektif. Dengan adanya Rencana Kerja (Renja), suatu satuan kerja dapat membangun strateginya sebagai bagian terpenting dalam rangka mewujudkan pelayanan prima kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam menyusun Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3)
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi RKPD Tahun 2017;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur Dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708-Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemukhtahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
17. Peraturan Daerah Kab. Balangan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kab. Balangan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 2018)
18. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Balangan.
19. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 9)
20. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023(Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 11).

3. Tujuan

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan Tahun 2023 dimaksudkan untuk memberikan arah, pedoman, dan landasan bagi setiap unit atau PNSD di lingkungan Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup dalam menyusun perencanaan pembangunan dan pelayanan tahunan masing-masing sub satuan kerja. Sedangkan tujuannya antara lain untuk:

1. Menyiapkan antisipasi perubahan yang akan terjadi secara pro-aktif;
2. Membangun strategi pencapaian hasil kerja tahun 2023;
3. Memberikan komitmen pada aktivitas atau kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023;
4. Meningkatkan komunikasi, kerjasama, dan koordinasi antar sub satuan kerja atau antar PNSD lingkup Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup;
5. Untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional/SPPN dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Untuk menjabarkan Rencana Strategi (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan serta memperhatikan situasi-situasi internal dan eksternal tahun berjalan;
7. Untuk menyusun pedoman pencapaian kinerja tahunan sebagai aktualisasi dari Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) secara sistematis, terencana, terarah dan berkesinambungan, sekaligus menampung aspirasi masyarakat dan integrasi dengan program/kegiatan sektor lainnya (lintas sektor).

4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja ini adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dipahami dengan baik.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Pada bagian ini memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan realisasi Renstra SKPD. Selain itu bab ini juga memuat analisis Kinerja Pelayanan SKPD; Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD; Review terhadap Rancangan Awal RKPD; dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III. TUJUAN, SASARAN, DAN PROGRAM KEGIATAN

Pada bab ini berisi telaahan terhadap Kebijakan Nasional; Tujuan dan Sasaran Renja SKPD; Program dan Kegiatan.

BAB IV. INDIKATOR KINERJA DAN KELOMPOK SASARAN YANG MENGGAMBARAKAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD

Pada bab ini menggambarkan indikator kinerja yang akan dicapai SKPD dikaitkan dengan target renstra periode berjalan.

BAB V. DANA INDIKATIF BESERTA SUMBERNYA SERTA PRAKIRAAN MAJU BERDASARKAN PAGU INDIKATIF

Pada bab ini berisi dana indikatif tahun berjalan dan prakiraan maju.

BAB VI. SUMBER DANA YANG DIBUTUHKAN UNTUK MENJALANKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Pada bab ini berisi uraian mengenai sumber dana yang dibutuhkan dalam menjalankan program dan kegiatan di SKPD pada tahun berjalan.

BAB VII. PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI TRIWULAN II TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Renja Sampai Triwulan II

Realisasi anggaran Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan pada tahun 2023 sampai triwulan II adalah sebagai berikut :

1. Pagu tahun 2023 pada Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran adalah sebesar Rp. 26.866.297.750,-
2. Realisasi anggaran pada triwulan II adalah sebesar Rp. 7.914.609.713,-

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada APBD yang telah dilakukan sebagai berikut:

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2023 yang dievaluasi	
						I		II			
1	2	3	4	7		8		9		12	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1.	2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase penyelesaian sengketa tanah garapan	100%	45.872.100	25%	5.350.000	25%	26.327.100	25%	26.327.100
	2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	100%	45.872.100	25%	5.350.000	25%	26.327.100	25%	26.327.100
1.	2.10.04.2.01.01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	45.872.100	0 Dokumen	5.350.000	0 Dokumen	26.327.100	0 Dokumen	26.327.100
2.	2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Persentase redistribusi tanah dan ganti kerugian kelebihan tanah absen tee	100%	10.500.000	25%	0	25%	1.600.000	25%	1.600.000
	2.10.06.2.01	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absen tee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Kelebihan Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absen tee	100%	10.500.000	25%	0	25%	1.600.000	25%	1.600.000
2.	2.10.06.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka kegiatan Redistribusi Tanah	1 Dokumen	10.500.000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	1.600.000	0 Dokumen	1.600.000
3.	2.10.09	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Persentase pengelolaan izin membuka tanah	100%	183.004.900	25%	16.450.000	25%	43.060.000	25%	43.060.000
	2.10.09.2.01	Penerbitan Izin Membuka Tanah	Persentase Pengelolaan Izin Membuka Tanah	100%	183.004.900	25%	16.450.000	25%	43.060.000	25%	43.060.000

3.	2.10.09 .2.01.0 2	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Jumlah Dokumen Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	1 Dokumen	183.004.900	0 Dokumen	16.450.000	1 Dokumen	43.060.000	1 Dokumen	43.060.000
4.	2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase Penatagunaan Tanah	100%	28.402.000	25%	8.861.200	25%	21.887.200	25%	21.887.200
	2.10.10 .2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penatagunaan Tanah	100%	28.402.000	25%	8.861.200	25%	21.887.200	25%	21.887.200
4.	2.10.10 .2.01.0 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan dan Penggunaan Tanah dalam (satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	28.402.000	0 Laporan	8.861.200	1 Laporan	21.887.200	1 Laporan	21.887.200
5.	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	9.713.413.550	25%	1.827.574.904	25%	4.790.165.925	25%	4.790.165.925
	2.11.01 .2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang di sampaikan Tepat Waktu	100%	95.788.000	25%	8.800.000	25%	22.000.000	25%	22.000.000
5.	2.11.01 .2.01.0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	59.368.000	0 Dokumen	6.160.000	1 Dokumen	15.400.000	1 Dokumen	15.400.000
6.	2.11.01 .2.01.0 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	36.420.000	1 Laporan	2.640.000	1 Laporan	6.600.000	1 Laporan	6.600.000
	2.11.01 .2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	6.828.094.650	25%	1.649.967.112	25%	3.959.064.174	25%	3.959.064.174
7.	2.11.01 .2.02.0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gajih dan Tunjangan ASN	45 Orang	6.780.954.650	45 Orang	1.644.687.112	45 Orang	3.945.864.174	45 Orang	3.945.864.174
8.	2.11.01 .2.02.0 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	26.920.000	0 Laporan	2.640.000	0 Laporan	6.600.000	0 Laporan	6.600.000
9.	2.11.01 .2.02.0 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	4 Laporan	20.220.000	1 Laporan	2.640.000	1 Laporan	6.600.000	1 Laporan	6.600.000
	2.11.01 .2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	48.000.000	25%	4.500.000	25%	4.500.000	25%	4.500.000

10.	2.11.01 .2.05.1 1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	48.000.000	1 Orang	4.500.000	1 Orang	4.500.000	1 Orang	4.500.000
	2.11.01 .2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	1.986.318.100	25	124.558.544	25	597.451.843	25	597.451.843
11.	2.11.01 .2.06.0 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	266.836.600	0 Paket	0	2 Paket	160.400.000	2 Paket	160.400.000
12.	2.11.01 .2.06.0 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	15.914.900	0 Paket	0	0 Paket	0	0 Paket	0
13.	2.11.01 .2.06.0 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	8.356.600	0 Dokumen	0	0 Dokumen	250.000	0 Dokumen	250.000
14.	2.11.01 .2.06.0 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.695.210.000	1 Laporan	124.558.544	1 Laporan	436.801.843	1 Laporan	436.801.843
	2.11.01 .2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	520.035.300	25%	26.054.148	25%	136.359.421	25%	136.359.421
15.	2.11.01 .2.08.0 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	23.098.400	0 Laporan	1.100.000	1 Laporan	7.275.000	1 Laporan	7.275.000
16.	2.11.01 .2.08.0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	119.997.200	0 Laporan	9.009.148	1 Laporan	38.004.921	1 Laporan	38.004.921
17.	2.11.01 .2.08.0 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	15.252.400	0 Laporan	1.425.000	1 Laporan	3.210.000	1 Laporan	3.210.000
18.	2.11.01 .2.08.0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	361.687.300	0 Laporan	14.520.000	1 Laporan	87.869.500	1 Laporan	87.869.500
	2.11.01 .2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	235.177.500	25%	13.695.100	25%	70.790.487	25%	70.790.487
19.	2.11.01 .2.09.0 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	181.481.300	3 Unit	6.655.100	2 Unit	53.190.487	2 Unit	53.190.487
20.	2.11.01 .2.09.0 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitas	3 Unit	53.696.200	0 Unit	7.040.000	1 Unit	17.600.000	1 Unit	17.600.000
6.	2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Perencanaan Lingkungan Hidup	100%	211.860.000	25%	3.520.000	25%	8.800.000	25%	8.800.000
	2.11.02 .2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) kabupaten/Kota	100%	211.860.000	25%	3.520.000	25%	8.800.000	25%	8.800.000

21.	2.11.02 .2.02.0 1	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	211.860.000	0 Dokumen	3.520.000	0 Dokumen	8.800.000	0 Dokumen	8.800.000
7.	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Udara, Air dan Tutupan Lahan	100%	979.009.200	25%	54.380.000	25%	220.864.900	25%	220.864.900
	2.11.03 .2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Indeks Kualitas Udara, Air dan Tutupan Lahan	100%	888.772.800	25%	54.380.000	25%	211.814.900	25%	211.814.900
22.	2.11.03 .2.01.0 1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air dan Udara, dan Laut	100 Dokumen	145.835.800	25 Dokumen	3.740.000	25 Dokumen	32.197.000	25 Dokumen	32.197.000
23.	2.11.03 .2.01.0 2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil koordinasi dan sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah kaca dari sektor Lingkungan Hidup yang dilaksanakan	1 Dokumen	58.189.800	0 Dokumen	0	0 Dokumen	5.650.000	0 Dokumen	5.650.000
24.	2.11.03 .2.01.0 3	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah pengambilan contoh uji, pengujian parameter kualitas lingkungan dan dokumen mutu yang dilaksanakan	1 Dokumen	684.747.200	0 Dokumen	50.640.000	1 Dokumen	173.967.900	1 Dokumen	173.967.900
	2.11.03 .2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Indeks Kualitas Udara, Air dan Tutupan Lahan	100%	45.300.000	25%	0	25%	4.470.000	25%	4.470.000
25.	2.11.03 .2.02.0 1	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan sosialisasi informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat di kabupaten/kota yang dilaksanakan	1 Laporan	45.300.000	0 Laporan	0	0 Laporan	4.470.000	0 Laporan	4.470.000
	2.11.03 .2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Indeks Kualitas Udara, Air dan Tutupan Lahan	100%	44.936.400	25%	0	25%	4.580.000	25%	4.580.000
26.	2.11.03 .2.03.0 4	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah dokumen Hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi	1 Dokumen	44.936.400	0 Dokumen	0	0 Dokumen	4.580.000	0 Dokumen	4.580.000
8.	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)		100	3.227.823.700	25	414.626.523	25	1.169.224.514	25	1.169.224.514
	2.11.04 .2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Dalam Kondisi Yang Terpelihara Dengan Baik	100%	3.227.823.700	25%	414.626.523	25%	1.169.224.514	25%	1.169.224.514

27.	2.11.04 .2.01.0 3	Pengelolaan Kebun Raya	Luas kebun raya yang dikelola lingkup kewenangan kabupaten/kota	8.4 Ha	504.487.800	2 Ha	43.769.987	2 Ha	201.249.400	2 Ha	201.249.400
28.	2.11.04 .2.01.0 4	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang dikelola lingkup kewenangan kabupaten/kota	80 Ha	2.723.335.900	20 Ha	370.856.536	20 Ha	967.975.114	20 Ha	967.975.114
9.	2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	100%	67.145.700	25%	0	25%	22.103.500	25%	22.103.500
	2.11.05 .2.01	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Persentase Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	100%	35.629.900	25%	0	25%	18.923.500	25%	18.923.500
29.	2.11.05 .2.01.0 2	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan pemenuhan komitmen persetujuan/izin penyimpanan sementara Limbah B3	2 Laporan	35.629.900	0 Laporan	0	1 Laporan	18.923.500	1 Laporan	18.923.500
	2.11.05 .2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	100%	31.515.800	25%	0	25%	3.180.000	25%	3.180.000
30.	2.11.05 .2.02.0 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan limbah B3 dengan pemerintah dan pemerintah provinsi dalam rangka pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan yang bukan menjadi kewenangan pemda kabupaten/kota serta pelaksanaan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang sesuai dengan kewenangan	1 Dokumen	31.515.800	0 Dokumen	0	0 Dokumen	3.180.000	0 Dokumen	3.180.000
10.	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan	100%	84.479.700	25%	8.800.000	25%	34.380.000	25%	34.380.000
	2.11.06 .2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan	100%	84.479.700	25%	8.800.000	25%	34.380.000	25%	34.380.000

31.	2.11.06 .2.01.0 1	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah koordinasi dan/atau persetujuan Teknis, persetujuan lingkungan, dan surat kelayakan operasi yang diberikan	1 Dokumen	48.899.900	0 Dokumen	5.890.000	0 Dokumen	20.710.000	0 Dokumen	20.710.000
32.	2.11.06 .2.01.0 3	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan dari usaha dan/atau kegiatan yang diawasi izin Lingkungan, Persetujuan lingkungan, Surat kelayakan operasi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	1 Laporan	35.579.800	0 Laporan	2.910.000	6 Laporan	13.670.000	6 Laporan	13.670.000
11.	2.11.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat, Kearifan Lokal dan MHA Yang Terkait dengan PPLH	100%	20.186.500	25%	0	25%	0	25%	0
	2.11.07 .2.01	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Persentase Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat, Kearifan Lokal dan MHA Yang Terkait Dengan PPLH	100%	20.186.500	25%	0	25%	0	25%	0
33.	2.11.07 .2.01.0 1	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, penyediaan data, dan informasi pengakuan keberadaan MHA kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH	1 Dokumen	20.186.500	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0
12.	2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Masyarakat	100%	25.338.000	25%	0	25%	0	25%	0
	2.11.08 .2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Masyarakat	100%	25.338.000	25%	0	25%	0	25%	0
34.	2.11.08 .2.01.0 3	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah masyarakat/kelompok masyarakat/pelaku usaha/kegiatan yang terlibat	140 Orang	25.338.000	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0
13.	2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	100%	108.957.000	25%	8.040.000	25%	20.500.000	25%	20.500.000
	2.11.09 .2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	100%	108.957.000	25%	8.040.000	25%	20.500.000	25%	20.500.000

35.	2.11.09 .2.01.0 1	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang dinilai kinerjanya dalam rangka PPLH	5 Entitas	108.957.000	0 Entitas	8.040.000	1 Entitas	20.500.000	1 Entitas	20.500.000
14.	2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	100%	39.040.000	25%	3.520.000	25%	16.760.000	25%	16.760.000
	2.11.10 .2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	100%	39.040.000	25%	3.520.000	25%	16.760.000	25%	16.760.000
36.	2.11.10 .2.01.0 1	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	1 Dokumen	39.040.000	0 Dokumen	3.520.000	1 Dokumen	16.760.000	1 Dokumen	16.760.000
15.	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Pengelolaan Persampahan	99%	12.121.265.400	20%	923.342.019	0%	1.538.936.574	20%	1.538.936.574
	2.11.11 .2.01	Pengelolaan Sampah	Persentase Pengelolaan Persampahan	99%	12.121.265.400	20%	923.342.019	0%	1.538.936.574	20%	1.538.936.574
37.	2.11.11 .2.01.0 2	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah laporan hasil pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, pendaauran ulang dan pemanfaatan kembali	1 Laporan	894.864.800	0 Laporan	65.557.000	1 Laporan	339.112.300	1 Laporan	339.112.300
38.	2.11.11 .2.01.0 3	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah sampah yang dipilih, dikumpulkan, diangkut, diolah, diproses akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/kota	14.58 Ton	5.059.240.600	5 Ton	857.785.019	4 Ton	459.818.274	4 Ton	459.818.274
39.	2.11.11 .2.01.0 7	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	57 Unit	6.167.160.000	5 Unit	0	24 Unit	740.006.000	24 Unit	740.006.000

Sumber : e monev Bappedalitbangda triwulan 2

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Tabel 2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan.

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD	Realisasi Capaian	Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2022	
1	Indeks Kualitas Air	-	50.30	50.30	51,33	
2	Indeks Kualitas Udara	-	91.16	91.16	91.93	
3	Indeks Kualitas Lahan	-	55,67	55,67	51.60	

Permasalahan/Hambatan

Beberapa permasalahan/hambatan dalam pelaksanaan antara lain:

1. Peningkatan jumlah penduduk sehingga mempengaruhi kualitas lingkungan.
2. Belum adanya masterplan pengendalian dan pencemaran sungai.
3. Penggunaan sumberdaya alternatif yang kurang optimal.
4. Belum optimalnya pengkajian dan pemanfaatan teknologi terhadap pengolahan air.

Solusi/Strategi Pemecahan masalah

1. Diperlukan tambahan tenaga teknis untuk pemantauan kualitas air, udara dan tenaga penganalisis data lingkungan;
2. Melakukan koordinasi tentang instrumen tata cara pengawasan sesuai dengan perundang-undangan;
3. Melakukan pengawasan bersama pengendalian pencemaran;
4. Sosialisasi peraturan perundangan tentang kewajiban dunia usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup;

2.3 Analisis Sosial Ekonomi SKPD.

Secara umum indikator kinerja yang telah ditetapkan oleh Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Balangan yaitu pada tujuan daerah :

A. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Tujuan daerah meningkatkan kualitas lingkungan hidup ditetapkan dalam misi daerah ke satu yaitu : Meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur perdesaan dan perkotaan. Dari tujuan yang telah ditetapkan tersebut maka sasaran daerah yang ingin di capai adalah agar kualitas lingkungan hidup meningkat dengan indikator kinerja : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

Strategi daerah yang ditetapkan dalam rangka tercapainya tujuan dan sasaran daerah tersebut adalah dengan :

a) Meningkatkan Indeks Kualitas Air, udara dan lahan.

Arah kebijakan yang ditetapkan dalam rangka strategi daerah tersebut adalah dengan :

1. Peningkatan pengurangan sampah dengan optimalisasi TPS3R.
2. Peningkatan Kuantitas dan kinerja bank sampah.
3. Peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan.
4. Peningkatan kebersihan jalan.
5. Peningkatan ketertiban dokumen lingkungan.
6. Peningkatan pemulihan LH, pengendalian perubahan iklim dan emisi GRK
7. Peningkatan konservasi air, udara dan tanah.
8. Peningkatan ketertiban pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup (PPLH)
9. Peningkatan pemantauan usaha/kegiatan berpotensi pencemaran lingkungan.
10. Peningkatan pemantauan penataan dokumen lingkungan
11. Peningkatan pengujian parameter kualitas air, udara dan lahan.

12. Peningkatan pemahaman dan serta peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan.
13. Peningkatan pemantauan reklamasi pasca tambang.
14. Peningkatan pembangunan RTH public.

Pada program dan kegiatan Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup ada beberapa kegiatan yang dapat menimbulkan sosial ekonomi masyarakat diantaranya adalah Program pengelolaan persampahan dan Program Pengelolaan Keanekaragaman hayati (Kehati).

Keberadaan sampah saat ini telah menjadi masalah nasional, maka kedepannya diharapkan pengelolaannya dilakukan secara komprehensif dan terpadu agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, aman bagi lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat. Diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan pemerintah daerah serta peran serta masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara profesional, efektif dan efisien.

Persampahan domestik saat ini lebih banyak dimusnahkan dengan metode in-situ, yaitu dengan dibakar dan dibuang ke lahan-lahan kosong sekitar perumahan. Sementara untuk sampah pasar dan sebagian perumahan perkotaan dikumpulkan dan diangkut ke TPA Batu Merah. Kegiatan pengelolaan sampah eksisting di Kabupaten Balangan dilakukan dengan cara pengumpulan oleh masyarakat/petugas yang ditunjuk, sampah yang diangkut dari wadah-wadah rumah/persil kemudian dimuat ke gerobak-gerobak untuk selanjutnya dimasukkan ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS). Sampah-sampah yang dipilah dapat dijual kembali ke pengepul sampah sedangkan sampah basah dimanfaatkan menjadi maggot atau dijadikan pupuk organik dan sampah yang tidak terpakai di angkut ke TPA. Dari kegiatan pemanfaatan sampah tersebut dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dari pengelolaan persampahan.

Ketersediaan ruang terbuka dan Ruang terbuka hijau sangat dibutuhkan oleh Kabupaten Balangan Regulasi yang mengatur batasan minimal sebesar 30% RTH harus dipenuhi secara bertahap. Proses pelaksanaannya memerlukan strategi terobosan untuk dapat membangun RTH publik di Kabupaten Balangan dengan diiringi kualitas dan sebarannya dari tingkat kota, kecamatan, desa kelurahan sampai dusun/lingkungan yang ideal bagi lingkungan yang seimbang. RTH di permukiman padat di pusat kota atau lingkungan cepat tumbuh menjadi kendala karena ketersediaan lahan.

Ruang terbuka hijau (RTH) dapat meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar dengan membuka usaha dari makan minum, cinderamata, jasa penyewaan, penginapan, dll sehingga masyarakat dapat manfaat lebih dari ruang terbuka hijau. Sosial, ruang terbuka hijau merupakan tempat/media masyarakat untuk saling berinteraksi mendapatkan kebutuhan rekreatif. RTH juga berfungsi sebagai kegiatan sosial ini terlihat pada beberapa RTH kemudian peran atau fungsi dari RTH sangat terlihat bahwa sumber perekonomian masyarakat dapat terbantu oleh adanya kunjungan masyarakat di RTH.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD

Pada Rencana Kerja Anggaran Perubahan Tahun 2023, program yang akan dilaksanakan sebanyak 15 program, Kegiatan yang akan dilaksanakan sebanyak 23 kegiatan dan 42 Sub Kegiatan. Pendanaan yang direncanakan sebesar Rp. 34.547.139.530,- Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tersebut berlokasi di lingkungan kantor, masyarakat, sekolah, sungai dan beberapa perusahaan wilayah Kab. Balangan.

Kode	Program	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2023										
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana	
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
(1)	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)=12-11	(14)	(15)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	ASN	ASN	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100 %	100 %	9.713.413.550	11.178.632.950	1.465.219.400	APBD	APBD
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disampaikan tepat waktu	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disampaikan tepat waktu	ASN	ASN	Kab. Balangan	Kab. Balangan	70	70	95.788.000	102.738.000	6.950.000	APBD	APBD
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	ASN	ASN	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1	2	59.368.000	62.838.000	3.470.000	APBD	APBD
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	ASN	ASN	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1	4	36.420.000	39.900.000	3.480.000	APBD	APBD
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	ASN	ASN	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100%	100%	6.828.094.650	7.335.054.650	506.960.000	APBD	APBD
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	ASN	ASN	Kab. Balangan	Kab. Balangan	45	45	6.780.954.650	7.280.954.650	500.000.000	APBD	APBD
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	ASN	ASN	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1	1	26.920.000	30.400.000	3.480.000	APBD	APBD
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	ASN	ASN	Kab. Balangan	Kab. Balangan	4	4	20.220.000	23.700.000	3.480.000	APBD	APBD

	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kepegawaian Perangkat Daerah	ASN	ASN	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100%	100%	48.000.000	48.000.000	-	APBD	APBD
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	ASN	ASN	Kab. Balangan	Kab. Balangan	10	13	48.000.000	48.000.000	-	APBD	APBD
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah	ASN	ASN	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100%	100%	1.986.318.100	2.501.906.600	515.588.500	APBD	APBD
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	ASN	ASN	Kab. Balangan	Kab. Balangan	4	13	266.836.600	474.283.100	207.446.500	APBD	APBD
	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengadaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengadaan yang Disediakan	ASN	ASN	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1	1	15.914.900	15.914.900	-	APBD	APBD
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	ASN	ASN	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1	1	8.356.600	8.356.600	-	APBD	APBD
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	ASN	ASN	Kab. Balangan	Kab. Balangan	300	494	1.695.210.000	2.003.352.000	308.142.000	APBD	APBD
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	ASN	ASN	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100%	100%	520.035.300	587.345.700	67.310.400	APBD	APBD
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	ASN	ASN	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1	1	23.098.400	28.998.400	5.900.000	APBD	APBD
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	ASN	ASN	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1	12	119.997.200	152.242.600	32.245.400	APBD	APBD
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	ASN	ASN	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1	12	15.252.400	44.077.400	28.825.000	APBD	APBD
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	ASN	ASN	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1	12	361.687.300	362.027.300	340.000	APBD	APBD
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	ASN	ASN	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100%	100%	235.177.500	603.588.000	368.410.500	APBD	APBD
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Pemerintah daerah dan masyarakat	Pemerintah daerah dan masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	10	15	181.481.300	340.331.800	158.850.500	APBD	APBD
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemerintah daerah dan masyarakat	Pemerintah daerah dan masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	3	4	53.696.200	263.256.200	209.560.000	APBD	APBD
	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase Perencanaan Lingkungan Hidup	Pemerintah daerah dan masyarakat	Pemerintah daerah dan masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100	100	211.860.000	595.430.000	383.570.000	APBD	APBD
	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	Persentase Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100	100	211.860.000	595.430.000	383.570.000	APBD	APBD
	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1	1	211.860.000	211.860.000	-	APBD	APBD
	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD		Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang disusun		Pemerintah daerah		Kab. Balangan		1	-	383.570.000	383.570.000		APBD
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100	100	979.009.200	1.068.015.300	89.006.100	APBD	APBD

	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100	100	888.772.800	977.778.900	89.006.100	APBD	APBD
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1	4	145.835.800	152.815.500	6.979.700	APBD	APBD
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1	1	58.189.800	58.189.800	-	APBD	APBD
	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1	4	684.747.200	766.773.600	82.026.400	APBD	APBD
	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100	100	45.300.000	45.300.000	-	APBD	APBD
	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1	1	45.300.000	45.300.000	-	APBD	APBD
	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100	100	44.936.400	44.936.400	-	APBD	APBD
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1	1	44.936.400	44.936.400	-	APBD	APBD
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase pengelolaan keanekaragaman hayati	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100	100	3.227.823.700	6.409.024.400	3.181.200.700	APBD	APBD
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase pengelolaan keanekaragaman hayati	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100%	100%	3.227.823.700	6.409.024.400	3.181.200.700	APBD	APBD
	Pengelolaan Kebun Raya	Luas Kebun Raya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Luas Kebun Raya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Usaha/Kegiatan	Usaha/Kegiatan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	8,4	8,4	504.487.800	555.327.800	50.840.000	APBD	APBD
	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Usaha/Kegiatan	Usaha/Kegiatan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	112,221	112,221	2.723.335.900	5.853.696.600	3.130.360.700	APBD	APBD
	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Usaha/Kegiatan	Usaha/Kegiatan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100	100	67.145.700	67.145.700	-	APBD	APBD
	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Persentase Pengawasan Pengendalian B3 dan Limbah B3	Persentase Pengawasan Pengendalian B3 dan Limbah B3	Usaha/Kegiatan	Usaha/Kegiatan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100%	100%	35.629.900	35.629.900	-	APBD	APBD

	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan Sementara dan Pengumpulan Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan Sementara dan Pengumpulan Limbah B3	Usaha/Kegiatan	Usaha/Kegiatan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	2	4	35.629.900	35.629.900	-	APBD	APBD
	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengumpulan limbah B3	Persentase pengumpulan limbah B3	Usaha/Kegiatan	Usaha/Kegiatan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100%	100%	31.515.800	31.515.800	-	APBD	APBD
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	Usaha/Kegiatan	Usaha/Kegiatan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1	1	31.515.800	31.515.800	-	APBD	APBD
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase pembinaan dan Pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan.	Persentase pembinaan dan Pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan.	Usaha/Kegiatan	Usaha/Kegiatan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100	100	84.479.700	108.492.700	24.013.000	APBD	APBD
	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pembinaan dan Pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan.	Persentase pembinaan dan Pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan.	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100%	100%	84.479.700	108.492.700	24.013.000	APBD	APBD
m	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1	12	48.899.900	52.399.900	3.500.000	APBD	APBD
	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1	7	35.579.800	56.092.800	20.513.000	APBD	APBD
	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT, KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat, Kearifan lokal dan MHA yang terkait dengan PPLH.	Persentase Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat, Kearifan lokal dan MHA yang terkait dengan PPLH.	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100	100	20.186.500	20.186.500	-	APBD	APBD
	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Persentase Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat, Kearifan lokal dan MHA yang terkait dengan PPLH.	Persentase Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat, Kearifan lokal dan MHA yang terkait dengan PPLH.	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100%	100%	20.186.500	20.186.500	-	APBD	APBD
	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1	1	20.186.500	20.186.500	-	APBD	APBD
	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100	100	25.338.000	25.338.000	-	APBD	APBD

	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan	Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100	100	25.338.000	25.338.000	-	APBD	APBD
	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	Masyarakat/Lembaga/Dunia usaha dan Dunia Pendidikan	Masyarakat/Lembaga/Dunia usaha dan Dunia Pendidikan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	140	140	25.338.000	25.338.000	-	APBD	APBD
	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Masyarakat/Lembaga/Dunia usaha dan Dunia Pendidikan	Masyarakat/Lembaga/Dunia usaha dan Dunia Pendidikan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100	100	108.957.000	127.957.000	19.000.000	APBD	APBD
	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penerimaan Penghargaan Lingkungan hidup	Persentase Penerimaan Penghargaan Lingkungan hidup	Masyarakat/Lembaga/Dunia usaha dan Dunia Pendidikan	Masyarakat/Lembaga/Dunia usaha dan Dunia Pendidikan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100%	100%	108.957.000	127.957.000	19.000.000	APBD	APBD
	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Usaha/Kegiatan dan Masyarakat	Usaha/Kegiatan dan Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	5	5	108.957.000	127.957.000	19.000.000	APBD	APBD
	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup	Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup	Usaha/Kegiatan dan Masyarakat	Usaha/Kegiatan dan Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100	100	39.040.000	42.480.000	3.440.000	APBD	APBD
	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup	Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup	Usaha/Kegiatan dan Masyarakat	Usaha/Kegiatan dan Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100%	100%	39.040.000	42.480.000	3.440.000	APBD	APBD
	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	Usaha/Kegiatan dan Masyarakat	Usaha/Kegiatan dan Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1	1	39.040.000	42.480.000	3.440.000	APBD	APBD
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Pengelolaan Persampahan	Persentase Pengelolaan Persampahan	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	99	99	12.121.265.400	14.347.310.680	2.226.045.280	APBD	APBD
	Pengelolaan Sampah	Persentase Sampah Terkelola	Persentase Sampah Terkelola	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	99	99	12.121.265.400	14.347.310.680	2.226.045.280	APBD	APBD
	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Laporan	Laporan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1	12	894.864.800	917.919.600	23.054.800	APBD	APBD
	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Ton	Ton	Kab. Balangan	Kab. Balangan	14,58	14,58	5.059.240.600	5.458.999.980	399.759.380	APBD	APBD
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Unit	Unit	Kab. Balangan	Kab. Balangan	57	214	6.167.160.000	7.970.391.100	1.803.231.100	APBD	APBD
	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	%	%	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100	100	45.872.100	306.677.100	260.805.000	APBD	APBD
	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah kabupaten	Persentase Penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah kabupaten	%	%	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100	100	45.872.100	306.677.100	260.805.000	APBD	APBD
	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Dokumen	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1	1	45.872.100	306.677.100	260.805.000	APBD	APBD
	Program Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	Persentase Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah	Persentase Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah	%	%	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100	100	10.500.000	10.500.000	-	APBD	APBD

		Absentee	Absentee											
	Penetapan Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah	Persentase Penetapan Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah	Persentase Penetapan Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah	%	%	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100	100	10.500.000	10.500.000	-	APBD	APBD
	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah	Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah	Dokumen	Dokumen	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1	1	10.500.000	10.500.000	-	APBD	APBD
	Program Pengelolaan Izin membuka Tanah	PERSENTASE PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	PERSENTASE PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	%	%	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100	100	183.004.900	262.247.200	79.242.300	APBD	APBD
	Penerbitan Izin Membuka Tanah	Persentase Penerbitan Izin Membuka Tanah	Persentase Penerbitan Izin Membuka Tanah	%	%	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100	100	183.004.900	262.247.200	79.242.300	APBD	APBD
	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Jumlah Dokumen Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Jumlah Dokumen Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Dokumen	Dokumen	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1	1	183.004.900	262.247.200	79.242.300	APBD	APBD
	Program Penatagunaan Tanah	PERSENTASE PENATAGUNAAN TANAH	PERSENTASE PENATAGUNAAN TANAH	%	%	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100	100	28.402.000	52.702.000	24.300.000	APBD	APBD
	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam 1 daerah kabupaten/kota	Persentase Penggunaan Tanah yang hamparannya dalam 1 daerah kabupaten/kota	Persentase Penggunaan Tanah yang hamparannya dalam 1 daerah kabupaten/kota	%	%	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100	100	28.402.000	52.702.000	24.300.000	APBD	APBD
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan	Laporan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1	1	28.402.000	52.702.000	24.300.000	APBD	APBD

Paringin, Agustus 2023.
Kepala Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup.



Aidinnor, S.Sos, MM
NIP. 196708171985091001

BAB IV PENUTUP

Demikian Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan ini disusun sebagai arah kebijakan kegiatan perencanaan yang akan direalisasikan pada tahun 2023. Renja ini merupakan penjabaran empiris dari Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan, khususnya yang berkenaan dengan Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup.

Sementara itu, di lain pihak pembuatan Renja Perubahan ini juga sebagai perwujudan atas tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang sesuai dengan tuntutan zaman harus dijalankan secara efisien dan efektif, berdayaguna dan berhasil guna serta harus mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip **“Good Governance.”**

Dengan demikian, keberadaan konsepsi Renja oleh setiap SOPD sangat diperlukan dalam rangka memberdayakan dan mengoptimalkan fungsi dan peran SOPD yang bersangkutan agar dapat diciptakan kondisi yang maju dan proporsional secara terencana, sistematis, terarah, bertahap dan berkesinambungan.

Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup menyadari benar bahwa, kinerja pemerintahan ini akan sulit berubah apabila kita tidak mampu melakukan transformasi sistem pemerintahan dari sistem yang birokratis ke arah sistem yang bertujuan untuk lebih memwirausahakan birokrasi pemerintah. Dengan kata lain mengubah fokus akuntabilitas dari orientasi pada masukan-masukan (***Inputs Oriented Accountability***) dan proses ke arah akuntabilitas pada hasil (***Results Oriented Accountability***). Kita bersama tentunya tidak ingin lagi ada instansi pemerintah yang tidak jelas kinerja dan pelayanannya kepada masyarakat.

Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup akan melakukan segala upaya yang diperlukan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki untuk mendorong agar penyelenggaraan pelayanan di seluruh wilayah kabupaten balangan dapat dilaksanakan dengan berprinsip pada tata pemerintahan yang baik yang menuju kepada pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (**Results Oriented Government**).

Terakhir, bahwa Renja ini bersifat intern dan dinamis. Artinya dipergunakan untuk kalangan terbatas pada Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan, namun bersifat fleksibel terhadap berbagai macam perubahan dan tuntutan baik yang dimunculkan oleh lingkungan internal maupun eksternal. Dinamis, berarti Renja Perubahan Tahun 2023 ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategik (Renstra) Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Tahun 2021-2026 yang harus mampu menggambarkan kondisi yang jauh lebih baik daripada kondisi-kondisi sebelumnya dan harus mampu memberikan arahan bagi peningkatan dan pengembangan kondisi selanjutnya.

Parangin, Agustus 2023.
Kepala Dinas Pertanahan dan
Lingkungan Hidup.



Aidinor, S.Sos, MM
NIP. 19670817 198509 1 001